



Pusat Penelitian Badan Keahlian  
Sekretariat Jenderal DPR RI

## KENAIKAN HARGA BBM DAN PENGALIHAN SUBSIDI: WUJUD APBN BERKEADILAN DAN BERKELANJUTAN

**Ariesy Tri Mauleny**  
Analisis Legislatif Ahli Muda  
[ariesy.mauleny@dpr.go.id](mailto:ariesy.mauleny@dpr.go.id)

### Isu dan Permasalahan

Butuh kehati-hatian dalam menerapkan kebijakan menaikkan harga BBM untuk mengurangi subsidi energi, yang dikeluarkan pemerintah pada 3 September 2022 lalu. Hal ini tidak terlepas dari upaya mengatasi konsekuensi APBN Tahun 2022 sebagai *shock absorber*, untuk mengantisipasi kondisi geopolitik dan proyeksi ekonomi dunia yang masih sangat dinamis. Konsekuensinya, subsidi dan kompensasi energi sesuai Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2022, meningkat tiga kali lipat dari APBN Tahun 2022 awal Rp152,5 triliun menjadi Rp502,4 triliun (Tabel 1).

**Tabel 1.** Kenaikan Subsidi dan Kompensasi Energi

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<b>Subsidi &amp; Kompensasi Energi</b>	119,1	106,8	97,6	94,6	144,4	199,9	188,3	502,4

(dalam triliun rupiah)

Kenaikan tersebut diperkirakan akan mencapai Rp698 triliun mengingat harga minyak mentah dan ICP masih dalam tren meningkat. Disamping peningkatan mobilitas seiring pemulihan aktivitas ekonomi dan perkiraan Solar dan Pertalite akan habis pada Oktober 2022.

Sebagian kalangan menganggap bahwa kenaikan BBM bersubsidi masih di angka moderat, namun potensi lonjakan inflasi nasional yang menggerus daya beli masyarakat harus dimitigasi sehingga momentum pemulihan ekonomi dapat terus berlanjut. Data inflasi pada kuartal II-2022 cukup mengkhawatirkan karena sudah menyentuh angka 4,94 persen (yoy). Meski ekonomi Indonesia tercatat tumbuh 5,44 persen pada kuartal yang sama, pertumbuhan menjadi tidak bermakna ketika inflasi tidak terkontrol karena secara substantif tingkat kesejahteraan masyarakat tidak naik.

Salah satu mitigasi yang bisa dijalankan adalah pengalihan subsidi energi menjadi perlindungan sosial. Pemerintah menargetkan menyalurkan pengalihan subsidi energi dalam bentuk: 1) Bantuan Langsung Tunai (BLT) sebesar Rp12,4 triliun kepada 20,65 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM); 2) Bantuan Subsidi Upah (BSU) sebesar Rp9,6 triliun kepada 16 juta pekerja bergaji maksimal Rp3,5 juta per bulan; dan 3) Bantuan sektor angkutan umum dan perlindungan sosial tambahan yang diperuntukkan bagi pengemudi angkutan umum, ojek, dan nelayan. Mekanisme yang ditempuh dengan meminta pemerintah daerah menyisihkan 2 persen dari dana alokasi umum dan dana bagi hasil sebesar Rp2,17 triliun. *Trade off* stabilisasi dengan distribusi diatas menjadi salah satu perwujudan dari APBN berkeadilan.

Meski demikian, pengalihan subsidi tersebut dinilai masih memiliki risiko. Mengingat inflasi yang sudah terjadi sebelumnya akibat disrupsi rantai pasok pangan dan energi global, belum sepenuhnya teratasi dan kini dihadapkan kembali pada potensi inflasi akibat kenaikan harga BBM bersubsidi. Oleh karena itu, besaran kompensasi pengalihan subsidi menjadi bantuan sosial kepada masyarakat tidak mampu harus tepat sasaran dan dilakukan dengan cepat. Pemerintah juga harus memiliki sinergi kebijakan untuk menjamin upaya mitigasi dan adaptasi terhadap kenaikan harga BBM dan pengalihan subsidi berjalan optimal.

Pengurangan subsidi energi menjadi pilihan paling rasional saat ini mengingat subsidi energi sudah mencapai 16,2 persen terhadap belanja negara. Cukup besar jika dibandingkan kesehatan (5 persen), gaji pegawai (14 persen) dan pendidikan (20 persen), apalagi subsidi energi tersebut mayoritas dinikmati oleh masyarakat menengah ke atas. Artinya, subsidi ratusan triliun rupiah, akan lebih menyehatkan bila disalurkan langsung ke masyarakat kurang mampu, dan disalurkan tidak langsung dalam bentuk peningkatan layanan kesehatan dan pendidikan, transportasi publik yang merata serta pembangunan infrastruktur yang memiliki *multiplier effect* tinggi bagi perekonomian.

Disadari, tidak ada masyarakat yang senang dengan kenaikan harga BBM. Namun, banyak pakar sepakat bahwa di balik itu semua, banyak peluang perbaikan tercipta ketika terjadi penyesuaian harga BBM di Indonesia. Pengembangan sistem perlindungan sosial yang bertumpu pada perbaikan database masyarakat serta penggunaan teknologi digitalisasi untuk menjamin mekanisme transfer dapat dilakukan secara langsung, cepat dan tepat sasaran. Selain itu, dapat menjadi momentum bagi percepatan transisi energi dan pembangunan rendah karbon di Indonesia. Karena kenaikan harga BBM, selain mengurangi konsumsi bahan bakar fosil yang pada akhirnya mengurangi emisi CO<sub>2</sub>, akan mendorong pengembangan energi baru terbarukan. Apalagi jika kemudian pemerintah dapat menghadirkan alternatif energi diantara pertalite dan pertamax yang bersumber pada ekonomi hijau. Hal ini tentu menjadi salah satu jalan terwujudnya APBN yang berkelanjutan.

## Atensi DPR

Kenaikan harga BBM dan pengalihan subsidi merupakan pilihan paling rasional saat ini demi menjaga sinergitas APBN sebagai *shock absorber* yang berkeadilan dan berkelanjutan di tengah kondisi geopolitik dan proyeksi ekonomi dunia yang dinamis. Atensi yang dapat diberikan DPR dalam hal ini Komisi XI adalah *pertama*, kenaikan harga BBM yang diperkirakan akan mengikis pertumbuhan ekonomi sebesar 0,28 persen harus dapat segera diantisipasi sehingga tidak berkontraksi semakin dalam. *Kedua*, memastikan bahwa kenaikan harga BBM dan pengalihan subsidi dapat dimitigasi dampaknya dan dilakukan adaptasi sehingga tidak membebani masyarakat kurang mampu dan mengganggu proses pemulihan ekonomi nasional. *Ketiga*, melalui fungsi pengawasan, DPR perlu memastikan bahwa fleksibilitas dalam penganggaran dan belanja APBN semakin memerhatikan upaya transformasi ekonomi Indonesia yang inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan.

## Sumber

*Kompas*, 5 dan 6 September 2022; *Media Indonesia*, 4 dan 5 September 2022; *Neraca*, 5 September.



**Koordinator** Sali Susiana  
**Polhukam** Puteri Hikmawati  
**Ekkuinbang** Sony Hendra P.  
**Kesra** Hartini Retnaningsih

<https://puslit.dpr.go.id>



@puslitbkd\_official



## EDITOR

**Polhukam**  
Simela Victor M.  
Prayudi  
Novianto M. Hantoro

## LAYOUTER

Dewi Sendhikasari D.  
Sita Hidriyah  
Noverdi Puja S.

©PuslitBK2022

**Ekkuinbang**  
Juli Panglima S  
Sri Nurhayati Q  
Sulasi Rongiyati  
Venti Eka Satya  
Rafika Sari

Anih S. Suryani  
Teddy Prasetiawan  
T. Ade Surya  
Masyithah Aulia A.  
Yosephus Mainake

**Kesra**  
Achmad Muchaddam F.  
Yulia Indahri  
Rahmi Yuningsih

Mohammad Teja  
Nur Sholikhah P.S.  
Fieka Nurul A.